



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BERISKHAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 274130

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 680.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/120 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 8.340 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah Seluas 9.804 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. Tanah Seluas 8.046 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 8.343 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 10.350 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 179.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA T G02T31L0 M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 194.435.042

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.053.935.042

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.053.935.042

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDHI ICHSAN ARIANTO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 684020

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/160 m² di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 270.000.000

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOBIL, NISSAN TERRANO JEEP Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 355.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.665.800.000

III. HUTANG Rp. 386.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.279.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.